



Research Article

Sejarah dan Dinamika Madrasah di Indonesia

Annisa Urrobingah¹, Apri Akmal Muzaky², Mei Fajri Rahayu³, Fahri Hidayat⁴

1. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia; urrobingahannisa@gmail.com
2. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia; apriakmalmuzaky@gmail.com
3. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia; miranmia64@gmail.com
4. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia; fahrihidayat@uinsaizu.ac.id

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Kasyafa: Jurnal Pendidikan Agama Islam**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : June 10, 2024
Accepted : July 03, 2024

Revised : June 25, 2024
Available online : August 29, 2024

How to Cite: Annisa Urrobingah, Apri Akmal Muzaky, Mei Fajri Rahayu, & Fahri Hidayat. (2024). History and Dynamics of Madrasas in Indonesia. *Kasyafa: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 15–26. <https://doi.org/10.61166/kasyafa.v1i1.3>

History and Dynamics of Madrasas in Indonesia

Abstract. Madrasa etymologically is Darosa which means a place where the learning process occurs. Whereas in terms of terminology, madrassas are devoted to Islamic institutions or under the auspices of the Ministry of Religion. Madrasas began to develop since the 20th century. During its development of Islam in the world, madrassas were directed at higher education institutions during pre-modern times. Currently Madrasas in Indonesia have three levels, where the lowest level is Madrasah Ibtida'iyah (MI) which is equivalent to Elementary Schools (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) equivalent to Junior High Schools (SMP), and Madrasah Aliyah (MA) equivalent to high school (high school). In Indonesia the term madrasa is not very well known at first. Initially Islamic education in Indonesia was carried out in pesantren, tajug, surau, langgar, mosque. The purpose of this study is to find out the history and development of madrasas in Indonesia.

Keywords: History, Madrasa, Dynamics, Education.

Abstrak. Madrasah secara etimologi yaitu darosa yang berarti suatu tempat dimana terjadi proses pembelajaran. Sedangkan secara terminologi, madrasah dikhususkan sebagai sekolah yang berlembaga islam atau dibawah naungan kemenag. Madrasah mulai berkembang sejak abad ke 20. Pada masa perkembangannya Islam di dunia, madrasah tertuju pada lembaga pendidikan tinggi pada masa pra-modern. Saat ini madrasah di Indonesia memiliki tiga tingkatan, dimana tingkatan yang paling rendah yaitu Madrasah Ibtida'iyah (MI) yang setara dengan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Madrasah Aliyah (MA) setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Di Indonesia istilah madrasah belum terlalu dikenal pada awalnya. Pada awalnya Pendidikan Islam di Indonesia dilakukan di pesantren, tajug, surau, langgar, masjid. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejarah dan perkembangan madrasah di Indonesia.

Kata kunci: Sejarah, Madrasah, Dinamika, Pendidikan.

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam memiliki objek kajian yang luas untuk di pelajari, salah satunya adalah sejarah yang bersumber dari pelaku sejarah maupun dari data-data yang dapat dibuktikan dengan benda-benda bersejarah yang menjadikan sejarah merupakan peristiwa masa lampau yang benar-benar terjadi¹. Pada tahap awal pendidikan Islam dimulai dengan adanya kontak individual dan kolektif antara mubaligh (pendidik) dengan murid-muridnya. Begitu kelompok Islam menetap di suatu daerah, mereka mulai membangun peradaban Islam dengan membangun masjid. Masjid merupakan lembaga pendidikan Islam yang pertama kali muncul yang berfungsi sebagai tempat ibadah dan pendidikan. Kemudian muncul lembaga pendidikan Islam lainnya seperti pesantren, dayah, surau dan madrasah yang muncul di Indonesia pada awal abad ke-20, sebelum Indonesia merdeka.

Dalam konteks sejarah, keberadaan madrasah merupakan perkembangan dari masjid, dimana proses pendidikan di masjid pada awalnya mencakup pendidik, peserta didik, materi, dan metode pembelajaran. Banyak masyarakat yang merasa tidak puas dengan sistem pendidikan Islam yang berlaku saat itu. Jadi ada aspek yang perlu diperbarui. Aspek yang perlu dimutakhirkan itu antara lain, pertama isi (dokumen), kedua metode, dan ketiga pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Meskipun metode ini kurang sesuai dengan suasana ketenangan masjid, namun perkembangan lebih lanjut mengarah pada pembentukan madrasah sebagai institusi pendidikan keagamaan di Indonesia.

Dengan adanya SKB Tiga Menteri, madrasah mulai berintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Pengelolaan madrasah semakin meningkat dengan sistem manajerial, termasuk komponen kurikulum yang teratur dan ketatausahaan yang lengkap. SKB Tiga Menteri tahun 1975 menjadi tonggak penting dalam sejarah madrasah, mengharuskannya untuk beradaptasi dengan perkembangan sosial dan pola hidup masyarakat. Legalisasi ini membawa madrasah agar standar kurikulumnya dengan sekolah negeri, bahkan memberikan opsi penegerian atau pemfilialan dengan

¹ Muhammad Nasir, *Sejarah Lembaga Pendidikan Islam (Madrasah) Di Indonesia*, AL QALAM: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 11.24 (2017), hlm. 1

sekolah negeri². Legalitas madrasah tertuang dalam sistem pendidikan nasional dengan dikeluarkannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, kemoderenan ini diperbaiki dalam Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003³.

Kebangkitan pendidikan Islam khususnya sekolah di Indonesia tidak lepas dari perjuangan para ulama dan organisasi Islam yang aktif menciptakan lembaga pendidikan Islam khususnya sekolah dengan menerapkan sistem klasikal dan menerapkan manajemen pendidikan.

PEMBAHASAN

Sejarah lembaga pendidikan madrasah di Indonesia bermula sejak agama Islam berkembang di nusantara. Kelahiran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia tidak terlepas dari penyebaran agama Islam yang dibawa oleh para pedagang dan penyebar agama Islam pada abad ke-13 Masehi. Pada awalnya, pendidikan Islam di Indonesia dilaksanakan di masjid-masjid dan surau-surau. Para ulama dan cendekiawan muslim mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam seperti tafsir, hadits, fiqh, dan lain-lain di tempat-tempat ibadah tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem pendidikan Islam mulai berubah dari model pengajian di masjid dan surau menjadi lembaga pendidikan yang lebih terstruktur, yaitu madrasah⁴.

Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang berkembang pesat di Indonesia, khususnya setelah munculnya gerakan pembaruan Islam di awal abad ke-20. Tokoh-tokoh pembaharu seperti Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Mahmud Yunus, dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) memberikan sumbangan pemikiran dan usaha untuk mendirikan madrasah-madrasah di berbagai daerah di Indonesia. Madrasah-madrasah yang didirikan pada masa itu umumnya menerapkan sistem klasikal dengan kurikulum yang lebih teratur dan modern dibandingkan dengan sistem pendidikan di surau-surau sebelumnya.

Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah kolonial mencoba untuk mengatur dan mengawasi keberadaan madrasah-madrasah di Indonesia. Tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad No. 604 yang mengatur tentang pengawasan terhadap sekolah-sekolah liar, termasuk madrasah-madrasah. Meskipun demikian, madrasah tetap eksis dan berkembang sesuai dengan semangat pembaharuan Islam yang bergulir pada saat itu. Bahkan, setelah Indonesia merdeka, madrasah semakin tumbuh dan berkembang menjadi lembaga pendidikan Islam yang modern dan terpadang.

²Nurul Fajri dan Darul Ilmi, *Evolusi Lembaga Pendidikan Islam dalam Sejarah Indonesia*, ADIBA: *Journal Of Education*, 4.1 (2024), hlm. 126-127

³ Muhammad Roihan Daulay, *Sejarah Madrasah Di Indonesia (Pendekatan Sejarah dan Perkembangannya)*, *Forum Paedagogik*, 12.1 (2021), hlm. 94

⁴ Iswandi, dkk, *Sejarah Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, *Jurnal Menata: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6.2 (2023), hlm. 23-30

1. Surau⁵

Surau merupakan lembaga pendidikan Islam yang berkembang di Sumatera, khususnya di Minangkabau. Pembahasan tentang surau dalam dokumen ini hanya mencakup periode awal pertumbuhannya hingga meredupnya pamor surau. Pada awalnya, surau berfungsi sebagai tempat ibadah dan pengajaran Islam bagi masyarakat Minangkabau. Surau didirikan oleh ulama-ulama setempat dan menjadi pusat aktivitas keagamaan dan pendidikan masyarakat.

Dalam perkembangannya, surau tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi tempat menginap bagi para pelajar yang datang dari berbagai daerah untuk belajar agama Islam. Kurikulum yang diajarkan di surau umumnya terfokus pada pengajaran kitab-kitab klasik atau kitab kuning. Selain itu, surau juga menjadi tempat berkumpul dan bermusyawarah bagi kaum laki-laki dalam masyarakat Minangkabau.

Namun, seiring berjalannya waktu, pamor surau mulai meredup. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain semakin berkembangnya lembaga pendidikan modern seperti sekolah umum dan madrasah yang lebih mampu mengakomodasi tuntutan zaman. Selain itu, perubahan sosial-budaya masyarakat Minangkabau juga turut mempengaruhi eksistensi surau sebagai lembaga pendidikan Islam.

2. Meunasah

Meunasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang berkembang di Aceh. Meunasah berfungsi sebagai tempat pengajaran agama Islam bagi masyarakat Aceh. Sama halnya dengan surau, meunasah pada awalnya hanya berfungsi sebagai tempat ibadah dan pengajaran dasar-dasar agama Islam.

Dalam perkembangannya, meunasah tidak hanya menjadi tempat pengajaran agama, tetapi juga menjadi pusat aktivitas sosial-kemasyarakatan bagi masyarakat Aceh. Di meunasah, selain diajarkan ilmu-ilmu keagamaan, juga diajarkan berbagai keterampilan praktis seperti pertukangan, pertanian, dan lain-lain.

Meskipun meunasah telah mengalami perkembangan, namun eksistensinya sebagai lembaga pendidikan Islam di Aceh semakin tergeser oleh kehadiran lembaga pendidikan modern seperti sekolah umum dan madrasah. Hal ini disebabkan oleh semakin tingginya tuntutan masyarakat Aceh akan pendidikan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan zaman.

3. Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang berkembang di Jawa. Pondok pesantren pada awalnya hanya berupa tempat sederhana untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam. Namun, dalam perkembangannya, pondok

⁵ Abdul Mukhlis, *Sejarah Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Nusantara (Telaah tentang Kelembagaan Surau, Meunasah, Pesantren dan Madrasah)*, AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan, 1.1 (2017), hlm. 117-138

pesantren telah menjadi lembaga pendidikan Islam yang lebih terorganisir dan komprehensif.

Di pondok pesantren, selain diajarkan ilmu-ilmu keagamaan, juga diajarkan berbagai keterampilan praktis untuk membekali para santri agar dapat hidup mandiri di masyarakat. Kurikulum di pondok pesantren umumnya terfokus pada pengajaran kitab-kitab klasik atau kitab kuning.

Pondok pesantren telah menjadi lembaga pendidikan Islam yang berperan penting dalam penyebaran dan pengembangan Islam di Nusantara. Keberadaan pondok pesantren juga menjadi pusat aktivitas sosial-keagamaan bagi masyarakat sekitarnya

Meskipun demikian, eksistensi pondok pesantren saat ini juga dihadapkan pada tantangan dengan semakin berkembangnya lembaga pendidikan modern seperti sekolah umum dan madrasah. Hal ini menuntut pondok pesantren untuk dapat beradaptasi dan mengakomodasi tuntutan zaman, agar tetap dapat mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan Islam yang relevan.

Sejarah dan dinamika madrasah di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode. Mulai dari masa penjajahan hingga saat ini.

Masa Awal Kemerdekaan

Departemen Agama yang resmi berdiri pada 3 Januari 1946 memiliki peran penting dalam pertumbuhan madrasah pada awal kemerdekaan. Madrasah pertama didirikan di Padang Panjang, Sumatera Barat, oleh Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1909 M⁶. Madrasah berawal dari sistem pendidikan Islam yang dikembangkan oleh pemerintah Kolonial Belanda, tetapi tetap tumbuh didukung oleh tokoh dan organisasi Islam.

Pada masa sebelumnya, perluasan madrasah paling signifikan terjadi melalui program seperti Pendidikan Hakim Agama Islam Negeri (PHIN) dan Pendidikan Guru Agama (PGA)⁷. Pendirian kedua program ini dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah Islam karena menghasilkan profesional yang akan memajukan Islam dan mendidik guru agama masa depan yang fokus pada pendidikan agama Islam. PGA didirikan oleh Kementerian Agama untuk menjamin keberlanjutan fungsi madrasah di Indonesia, meskipun asal-usulnya dapat ditelusuri ke masa sebelum kemerdekaan, khususnya di Minangkabau. Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan madrasah sebagian besar akan digerakkan oleh para pendidik agama lulusan PGA.

Akibat melimpahnya tenaga pendidik berkualitas dari madrasah, penyebaran madrasah di Indonesia terjamin. "Sejarah terbentuknya PGA berawal dari program Departemen Agama yang ditangani oleh Abdullah Sigit sebagai penanggung jawab departemen pendidikan," (Dawam et al., 2014) mengutip catatan Mahmud Yunus. Departemen ini mendirikan dua sekolah pada tahun 1950, yaitu Sekolah Guru Islam dan Sekolah Tinggi Guru Islam, keduanya merupakan madrasah untuk guru

⁶ Mad Sobirin, dkk, *Sejarah Kebangkitan dan Perkembangan Madrasah Di Indonesia*, Scaffolding: *Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme*, 4.3 (2022), hlm. 528

⁷ Manpan Drajat, *Sejarah Madrasah Di Indonesia*, *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 1.1 (2018), hlm. 204

profesional (SGAI). Program lima tahun dirancang untuk siswa yang telah menyelesaikan SR/MI, sementara program akselerasi dua tahun dirancang untuk mereka yang telah menyelesaikan SMP/Madrasah Tsanawiyah. Dengan perkembangan baru, SGAi sekarang dikenal sebagai Sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA), sementara SGHI sekarang dikenal sebagai Sekolah Guru Hakim Agama (SHGA)⁸.

Keberadaan pesantren dan madrasah mendapat pengakuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) sebagai Badan Pekerja MPR pada masa itu. Upaya peningkatan mutu madrasah juga dilakukan dengan meningkatkan status madrasah-madrasah yang dikelola oleh masyarakat, baik pribadi maupun organisasi, dari swasta menjadi negeri. Madrasah-madrasah yang dinegrikan itu mulai tingkat dasar yang diberi nama Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), tingkat lanjutan pertama diberi nama Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri (MTsAIN), dan tingkat atas diberi nama Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN). Selanjutnya, didorong oleh keinginan untuk memodernkan dunia pesantren dan madrasah, sekitar tahun 1958, Departemen Agama mengadakan pembaharuan secara revolusioner dalam bidang pendidikan di madrasah. Hal itu diwujudkan dengan mendirikan Madrasah Wajib Belajar (MWB) dengan masa studi 8 tahun. Tujuannya adalah mempersiapkan kualitas anak didik untuk dapat hidup mandiri dan mencari nafkah, terutama dalam bidang ekonomi, industri, dan transmigrasi. Untuk mencapai tujuan itu maka kurikulumnya disusun dengan mempertimbangkan keselarasan tiga perkembangan anak, yaitu perkembangan otak atau akal (kognitif), perkembangan hati atau perasaan (afektif), dan perkembangan tangan atau ketrampilan⁹.

Masa Penjajahan Belanda

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, madrasah mulai berkembang berkat semangat pembaruan di kalangan umat Islam. Pertumbuhan madrasah ini mencerminkan kemajuan menuju perbaikan. Ada dua faktor penting yang melatarbelakangi kelahiran madrasah: pertama, pendidikan Islam tradisional dianggap kurang sistematis dan kurang memberikan kemampuan pragmatis yang memadai; kedua, pertumbuhan sekolah-sekolah ala Belanda yang membawa nilai-nilai sekuler memerlukan penyeimbang berupa sistem pendidikan Islam yang lebih teratur.

Sistem pendidikan pemerintah Hindia Belanda awalnya hanya terbuka untuk kalangan bangsawan Indonesia, melalui Sekolah Kelas Satu (*Hollands Inlandsche School/HIS*) dan Sekolah Kelas Dua (*Standard School*). Sekolah-sekolah ini didirikan dengan tujuan utama mencetak pegawai pemerintah serta pegawai untuk sektor perdagangan dan perusahaan. Dalam politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda, pendirian sekolah-sekolah ini merupakan langkah lanjutan setelah sebelumnya pendidikan hanya disediakan untuk kalangan Belanda sendiri¹⁰.

⁸ Mad Sobirin, dkk, *Sejarah.....*, hlm. 536-537

⁹ M. Fahim Tharaba, *Pesantren dan Madrasah dalam Lintasan Politik Pendidikan Di Indonesia*, MANAGERE: *Indonesian Journal of Education Management*, 2.2 (2020), hlm. 141-142

¹⁰ Manpan Drajat, *Sejarah Madrasah.....*, hlm. 201-202

Pemerintah Hindia Belanda mengawasi pendidikan Islam melalui kebijakan Ordonansi Guru, yang mewajibkan guru agama untuk memiliki izin dari pemerintah¹¹. Kebijakan ini bersifat politis untuk mencegah pendidikan agama menjadi pemicu perlawanan rakyat terhadap penjajah. Pengalaman perlawanan di Cilegon tahun 1888 menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk menerbitkan Ordonansi Guru. Kebijakan ini dianggap oleh umat Islam sebagai upaya untuk membatasi perkembangan pendidikan Islam dan menghapus peran penting Islam di Indonesia.

Reaksi umat Islam terhadap kebijakan ini terbagi dalam dua corak: defensif dan progresif. Sikap defensif ditunjukkan dengan menjauhkan diri dari pengaruh politik Hindia Belanda, seperti yang terlihat dalam sistem pendidikan pesantren yang terletak di daerah terpencil dan berfokus pada pembinaan mental keagamaan. Pesantren berfungsi sebagai benteng pertahanan umat Islam terhadap penetrasi penjajah, meskipun harus terasing dari perkembangan masyarakat modern.

Secara umum, umat Islam menolak segala bentuk ordonansi dari pemerintah Hindia Belanda. Meskipun di bawah pengawasan ketat, madrasah mulai tumbuh. Beberapa madrasah mendapatkan pengakuan dari pemerintah, meskipun hanya setengah-setengah. Kebanyakan madrasah berdiri berkat inisiatif tokoh dan organisasi tertentu tanpa dukungan pemerintah, dan memenuhi kebutuhan pendidikan sebagian rakyat di tengah pembatasan diskriminatif dari pemerintah.

Masa Penjajahan Jepang

Kebijakan Jepang yang lebih terbuka terhadap pendidikan Islam memungkinkan madrasah berkembang lebih cepat. Pada masa penjajahan Jepang, kebijakan yang kurang menguntungkan terhadap pendidikan Islam masih berlanjut, meskipun ada beberapa modifikasi. Jepang lebih memberikan kebebasan dibanding Belanda, namun tetap fokus pada penguatan kekuasaannya di Indonesia. Pemerintah Jepang mengendalikan program-program pendidikan dengan ketat, meski menghadapi kendala kekurangan tenaga pengajar yang memenuhi kriteria. Untuk memutus hubungan dengan Belanda, Jepang menghapuskan sekolah-sekolah berbahasa Belanda dan memperluas penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan pendidikan. Kurikulum dan sistem pendidikan diubah.

Untuk mendapatkan dukungan dari umat Islam, pemerintah Jepang memberikan bantuan dana bagi sekolah dan madrasah. Berbeda dengan Belanda, Jepang membiarkan madrasah yang pernah ditutup untuk dibuka kembali, karena pengawasan mereka tidak mampu menjangkau pesantren dan madrasah yang sebagian besar berada di daerah terpencil. Namun, Jepang tetap mewaspadaai potensi perlawanan dari madrasah-madrasah tersebut. Untuk mengamankan kepentingannya, Jepang mengangkat banyak kalangan priyayi dalam jabatan di Kantor Urusan Agama, yang lebih bisa diajak bekerja sama dan tidak terlalu peduli pada gerakan pendidikan Islam. Kantor ini bertugas mengorganisasikan pertemuan

¹¹ Dielfi Mariana dan Achmad Mahrus Helmi, *Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Di Indonesia, Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6.1 (2022), hlm. 1909

dan pembinaan guru-guru agama, dengan tujuan utama memastikan pendidikan Islam tetap dalam kontrol pemerintah.

Respon umat Islam terhadap kebijakan Jepang cenderung lebih progresif. Di Minangkabau, ulama mendirikan Majelis Islam Tinggi Minangkabau yang dipimpin oleh M. Jamil Jambek dan Mahmud Yunus. Majelis ini mengkoordinasikan pendidikan agama di madrasah dan sekolah, membuat kurikulum untuk menjamin standar mutu pendidikan agama. Pemerintah Jepang mempertimbangkan serius usulan dari Majelis Islam Tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan¹².

Pada masa penjajahan Jepang, pengembangan Madrasah Awaliyah digalakkan secara luas. Majelis Islam Tinggi menjadi penggagas utama madrasah-madrasah awaliyah yang diperuntukkan bagi anak-anak minimal usia 7 tahun. Pendidikan di madrasah-madrasah ini lebih menekankan pada pembinaan keagamaan dan diselenggarakan pada sore hari, untuk memberikan keseimbangan bagi anak-anak yang mengikuti sekolah-sekolah rakyat pada pagi hari. Perkembangan madrasah-madrasah ini turut mewarnai pola pengorganisasian pendidikan agama yang lebih sistematis. Madrasah menjadi lebih modern dan berkelas, serta menerima bantuan dari pemerintah Jepang.

Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, kurikulum madrasah mulai disusun pada pertemuan di Cibogo, Jawa Barat, pada 10-20 Agustus 1970. Pertemuan ini menghasilkan Keputusan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 1971 yang melahirkan Kurikulum Madrasah 1975. Madrasah menjadi perpaduan antara pendidikan sistem pondok yang mengajarkan agama Islam dan pendidikan yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum.

Menurut SKB tiga menteri tahun 1975, madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan minimal 30% di samping mata pelajaran umum. Setelah lahirnya SKB tiga menteri, Departemen Agama menyusun kurikulum madrasah melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tanggal 29 Desember 1976, yang diberlakukan secara nasional mulai tahun 1978. Madrasah berjasa melahirkan putra-putri terbaik yang dapat berkiprah dalam seluruh aspek kehidupan bangsa. Madrasah juga melakukan re-evaluasi dan reformasi terhadap visi, misi tujuan, kurikulum, dan berbagai komponen pendidikannya yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman¹³.

Masa Reformasi dan Globalisasi

Pada masa reformasi, otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan menjadi penanda utama. Perkembangan madrasah pada periode ini mengalami beberapa perubahan, antara lain dalam pengelolaan pendidikan agama yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan asas desentralisasi, perubahan dalam aspek pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Selain kebijakan tersebut, perkembangan madrasah pada masa reformasi juga diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹² Dielfi Mariana dan Achmad Mahrus Helmi,..... hlm.1909-1910

¹³ Dielfi Mariana dan Achmad Mahrus Helmi,..... hlm.1910-1911

(SISDIKNAS), yang mengatur secara lebih rinci penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, termasuk kedudukan, fungsi, jalur, jenjang, jenis, dan bentuk kelembagaan madrasah. Undang-undang ini memperkuat kedudukan madrasah sebagai lembaga yang setara dengan lembaga pendidikan lainnya.

Fungsi, peran, dan status madrasah dalam UU No. 20 tahun 2003 secara substansial tidak berbeda jauh dengan yang tercantum dalam UU No. 2 tahun 1989. Namun, dari segi yuridis, kedudukan madrasah dalam UU No. 20 tahun 2003 lebih kuat karena istilah madrasah sudah tercantum dalam batang tubuh undang-undang, berbeda dengan UU No. 2 tahun 1989 yang hanya mengatur madrasah dalam peraturan pemerintah dan surat keputusan menteri.

Pada periode ini, madrasah telah memasuki era baru sebagai sekolah dengan ciri khas agama Islam. Struktur kurikulumnya sama dengan sekolah umum, namun memiliki kekhasan dalam pelajaran keislaman, suasana lingkungan yang Islami, serta pendidik dan peserta didik yang berkarakter Islami¹⁴.

Masa Pandemi

Pandemi Covid-19 memunculkan inovasi baru dalam dunia pendidikan, salah satunya adalah pembelajaran online atau daring. Namun, pembelajaran daring ini menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pelaksanaannya bagi calon guru di lembaga pendidikan dan kependidikan (LPTK). Oleh karena itu, perlu dicari solusi dan langkah-langkah ke depan sebagai proyeksi untuk mengatasi hambatan tersebut.

Hambatan, solusi, dan proyeksi pembelajaran daring bagi calon guru menjadi penting untuk dipahami, mengingat sistem ini digunakan oleh dosen di LPTK sebagai lembaga yang mencetak calon tenaga guru dan tenaga kependidikan akibat pandemi Covid-19. Tantangan dan peluang bagi dunia pendidikan, khususnya madrasah, adalah menjaga peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat dari tantangan ini. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama RI, menerapkan kebijakan belajar dan bekerja dari rumah (*Work from Home*) sejak pertengahan Maret 2020.

Pandemi Covid-19 berdampak besar pada semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Rumah menjadi lembaga pendidikan yang menggantikan lembaga formal demi mencapai tujuan agama Islam seperti menjaga jiwa (*hifzul nafs*). Kita harus taat menjaga protokol kesehatan sesuai aturan Allah dalam Al-Quran, yang menyuruh kita menghindari mara bahaya, termasuk penyakit.

Sebagai pengelola pendidikan di madrasah, penting untuk tetap menjalankan aturan yang ditetapkan. Pemerintah memberikan kebijakan melalui Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran. Surat edaran ini mengarahkan semua lembaga pendidikan, termasuk madrasah, untuk mengikuti prosedur pembelajaran daring.

Madrasah harus menyesuaikan diri dengan pola pembelajaran baru ini. E-Learning menjadi hal baru bagi sebagian guru, terutama di daerah yang belum terbiasa dengan teknologi. Namun, mereka harus beradaptasi dengan menggunakan

¹⁴ Ach. Taufik Hidayatullah, dkk, *Sejarah Lembaga Pendidikan Islam (Madrasah) dan Perkembangannya Di Indonesia*, Jurnal Mahasiswa, 4.3 (2022), hlm. 4

internet dan ponsel sebagai alat bantu mengajar. Kondisi ini memaksa para guru untuk terbiasa dengan dunia internet, meski awalnya enggan.

Pembelajaran daring tidak mudah bagi sebagian guru dan anak didik, yang juga harus beradaptasi. Agar pembelajaran efektif, guru dituntut untuk kreatif mengembangkan inovasi pembelajaran. Inovasi bersifat dinamis dan perlu terus dilaksanakan sepanjang ada problematika¹⁵.

Masa Sekarang

Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah melibatkan pelaksanaan berbagai komponen sistem pendidikan pada berbagai jenjang madrasah, yaitu Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan, agar proses pendidikan dapat berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Madrasah merupakan satuan pendidikan formal yang berada di bawah naungan Menteri Agama, yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan ciri khas agama Islam, mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan¹⁶.

Secara keseluruhan sejarah madrasah di Indonesia, madrasah telah berjasa dalam meningkatkan kualitas pendidikan, serta memberikan kontribusi pada perkembangan bangsa Indonesia. Madrasah juga telah menghadapi berbagai tantangan dan perubahan, namun tetap tumbuh dan berkembang sebagai lembaga pendidikan yang penting di Indonesia.

KESIMPULAN

Sejarah lembaga pendidikan madrasah di Indonesia bermula sejak agama Islam berkembang di nusantara. Kelahiran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia tidak terlepas dari penyebaran agama Islam yang dibawa oleh para pedagang dan penyebar agama Islam pada abad ke-13 Masehi. Pada awalnya, pendidikan Islam di Indonesia dilaksanakan di masjid-masjid dan surau-surau. Para ulama dan cendekiawan muslim mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam seperti tafsir, hadits, fiqh, dan lain-lain di tempat-tempat ibadah tersebut.

1. Surau merupakan lembaga pendidikan Islam yang berkembang di Sumatera, khususnya di Minangkabau. Surau didirikan oleh ulama-ulama setempat dan menjadi pusat aktivitas keagamaan dan pendidikan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain semakin berkembangnya lembaga pendidikan modern seperti sekolah umum dan madrasah yang lebih mampu mengakomodasi tuntutan zaman. Selain itu, perubahan sosial-budaya masyarakat Minangkabau juga turut mempengaruhi eksistensi surau sebagai lembaga pendidikan Islam.
2. Meunasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang berkembang di Aceh. Meskipun meunasah telah mengalami perkembangan, namun eksistensinya sebagai lembaga pendidikan Islam di Aceh semakin tergeser oleh kehadiran

¹⁵ Muhammad Roihan Daulay, *Sejarah Madrasah Di Indonesia.....*, hlm. 103-106

¹⁶ Mad Sobirin, dkk, *Sejarah.....*, hlm. 537

- lembaga pendidikan modern seperti sekolah umum dan madrasah. Hal ini disebabkan oleh semakin tingginya tuntutan masyarakat Aceh akan pendidikan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Pondok Pesantren, eksistensi pondok pesantren saat ini juga dihadapkan pada tantangan dengan semakin berkembangnya lembaga pendidikan modern seperti sekolah umum dan madrasah. Sejarah dan dinamika madrasah di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode.
 4. Masa Penjajahan Belanda. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, madrasah mulai berkembang berkat semangat pembaruan di kalangan umat Islam. Pertumbuhan madrasah ini mencerminkan kemajuan menuju perbaikan. Meskipun di bawah pengawasan ketat, madrasah mulai tumbuh. Beberapa madrasah mendapatkan pengakuan dari pemerintah, meskipun hanya setengah-setengah. Kebanyakan madrasah berdiri berkat inisiatif tokoh dan organisasi tertentu tanpa dukungan pemerintah, dan memenuhi kebutuhan pendidikan sebagian rakyat di tengah pembatasan diskriminatif dari pemerintah.
 5. Masa Penjajahan Jepang. Kebijakan Jepang yang lebih terbuka terhadap pendidikan Islam memungkinkan madrasah berkembang lebih cepat. Untuk mendapatkan dukungan dari umat Islam, pemerintah Jepang memberikan bantuan dana bagi sekolah dan madrasah. Berbeda dengan Belanda, Jepang membiarkan madrasah yang pernah ditutup untuk dibuka kembali, karena pengawasan mereka tidak mampu menjangkau pesantren dan madrasah yang sebagian besar berada di daerah terpencil. Namun, Jepang tetap mewaspadaai potensi perlawanan dari madrasah-madrasah tersebut. Majelis ini mengkoordinasikan pendidikan agama di madrasah dan sekolah, membuat kurikulum untuk menjamin standar mutu pendidikan agama. Pada masa penjajahan Jepang, pengembangan Madrasah Awaliyah digalakkan secara luas. Majelis Islam Tinggi menjadi penggagas utama madrasah-madrasah awaliyah yang diperuntukkan bagi anak-anak minimal usia 7 tahun. Pendidikan di madrasah-madrasah ini lebih menekankan pada pembinaan keagamaan dan diselenggarakan pada sore hari, untuk memberikan keseimbangan bagi anak-anak yang mengikuti sekolah-sekolah rakyat pada pagi hari. Perkembangan madrasah-madrasah ini turut mewarnai pola pengorganisasian pendidikan agama yang lebih sistematis. Madrasah menjadi lebih modern dan berkelas, serta menerima bantuan dari pemerintah Jepang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Taufik Hidayatullah, J. M. (2022). Sejarah Lembaga Pendidikan Islam (Madrasah) dan Perkembangannya Di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa* 4.3, 214-218.
- Aristiyanto, R. (2023). Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Madrasah di Indonesia pada Era Modern. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan (JIMPIAN)* 3.2, 101-108.
- Daulay, M. R. (2021). Sejarah Madrasah Di Indonesia (Pendekatan Sejarah dan Perkembangannya). *Forum Pedagogik* 12.1, 93-108.

- Dielfi Mariana, A. M. (2022). Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6.1, 1907-1919.
- Drajat, M. (2018). Sejarah Madrasah Di Indonesia. *Al-Afkar: Journal of Islamic Studies* 1.1, 196-206.
- Fauzi Fahmi, F. F. (2021). Orientasi Perkembangan Pendidikan Islam Pasca Proklamasi Indonesia. *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam* 6.1, 83-95.
- Febri Malfi, S. Z. (2023). Kebangkitan dan Perkembangan Madrasah di Indonesia. *AJUP* 3.1, 24-30.
- Hikmah, M. (2020). Eksistensi Madrasah dalam Perspektif Sejarah Pendidikan Di Indonesia . *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* 15.2, 520-525.
- Iswandi, R. M. (2023). Sejarah Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Menata: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 6.2, 23-30.
- Mad Shobirin, A. W. (2022). Sejarah Kebangkitan dan Perkembangan Madrasah Di Indonesia. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme* 4.3, 525-539.
- Mukhlis, A. (2017). Sejarah Lembaga Pendidikan Islam Nusantara (Telaah tentang kelembagaan Surau, Meunasah, Pesantren dan Madrasah). *AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan* 1.1, 117-138.
- Nasir, M. (2017). Sejarah Lembaga Pendidikan Islam (Madrasah) Di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 11.24, 1.
- Nurul Fajri, D. I. (2024). Evolusi Lembaga Pendidikan Islam dalam Sejarah Indonesia. *ADIBA: Journal of Education* 4.1, 121-131.
- Tharaba, M. F. (2020). Pesantren dan Madrasah dalam Lintasan Politik Pendidikan Di Indonesia. *MANAGERE: Indonesian Journal of Education Management* 2.2, 136-148.
- Zainuddin. (2021). Madrasah: Sejarah dan Dinamikanya . *At-Taftkir: Jurnal Pendidikan, Hukum dan Sosial Keagamaan* 14.1, 27-49.